

ABSTRAK

Terdapat adanya perbedaan mengenai kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu antara penetapan dari Menteri Sosial dengan hasil pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik sehingga terjadi suatu permasalahan yaitu pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada Tahun 2017-2018. Hal tersebut dikarenakan pemerintah desa yang kebingungan harus mengacu pada peraturan mana dalam menentukan orang miskin dan orang tidak mampu.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif. Analisa bahan hukum normatif dilakukan dengan pengkajian terhadap bahan-bahan hukum tertulis yaitu berdasarkan pengumpulan peraturan perundang-undangan (*State Approach*) yang mencakup penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal dan berdasarkan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Keputusan Menteri Sosial Nomor 146 / HUK / 2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu perlu adanya perubahan, karena Badan Pusat Statistik telah melakukan pemutakiran kriteria hasil dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2014 oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif dengan menghasilkan 14 kriteria miskin. Tujuan dari adanya sinkronisasi penetapan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu ini yakni agar pemerintah tidak bingung dalam mendata penduduk miskin melalui penetapan kriteria dari Keputusan Menteri Sosial yang terbaru. Sehingga dalam merubah kriteria dengan adanya sinkronisasi ini bertujuan agar kriteria yang baru bisa digunakan sebagai acuan terpadu dan dalam Pemberian Bantuan Iuran (PBI) pemerintah tepat sasaran.

Kata Kunci : Sinkronisasi, Kriteria Fakir Miskin, dan Orang Tidak Mampu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Keaslian Penelitian	9
1.6. Metode Penelitian	13
1.7. Sistematika Penulisan	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU SERTA TINJAUAN UMUM SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	19
2.1. Tinjauan Umum Tentang Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu..	19
2.2. Esensi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).....	19

2.3. Tinjauan Umum Tentang Sinkronisasi dan Konflik Norma Hukum ...	26
2.3.1. Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan	26
2.3.2. Uraian tentang Konflik Norma Hukum	33
2.3.3. Teori Tujuan Hukum (Teori Oportatif).....	40
BAB III MEKANISME DALAM MENENTUKAN KRITERIA FAKIR MISKIN	
DAN ORANG TIDAK MAMPU YANG DILAKUKAN	
KEMENTERIAN SOSIAL DAN BADAN PUSAT STATISTIK.....	
3.1. Analisis Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dalam	45
Peraturan Perundang-Undangan	
3.1.1. Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dalam Hierarki	45
Peraturan Perundang-Undangan	
3.1.2. Kewenangan Penetapan Kriteria Fakir Miskin dan Orang	54
Tidak Mampu dalam Peraturan Perundang-Undangan	
3.2. Mekanisme dalam menentukan Kriteria Fakir Miskin dan Orang	62
Tidak Mampu yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dan Badan	
Pusat Statistik.....	
BAB IV PENUTUP	77
4.1. Kesimpulan	77
4.2. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
BIODATA PENULIS	83

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1 Perbedaan Penetapan Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu antara Keputusan Menteri Sosial dan Badan Pusat Statistik	3
2.	Tabel 2 Penelitian Skripsi Sebelumnya	10
3.	Tabel 3 Analisis kewenangan pembentukan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu	61
4.	Tabel 4 Garis Kemiskinan, Persentase, dan Jumlah Penduduk Miskin, 1976-1996 (menggunakan standar sebelum 1998)	64
5.	Tabel 5 Garis orang tidak mampu (miski), Presentase, dan Jumlah Penduduk Miskin, 1996-2007 (menggunakan metode 1998)	66
6.	Tabel 6 Matrik Transisi Kemiskinan 2005-2006 (%)	67
7.	Tabel 7 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1999-2016	68
8.	Tabel 8 Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial	69
9.	Tabel 9 perbandingan penetapan kriteria fakir miskin dan orang dan tidak mampu	72